

**PERANANDINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN MESUJI  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
(Studi di Kecamatan Tanjung Raya)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Faisal Suhandi  
1116021039**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN MESUJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi di Kecamatan Tanjung Raya)**

**Oleh  
Faisal Suhandi**

Keberadaan infrastruktur yang rusak menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Mesuji terutama kondisi infrastuktur Kecamatan Tanjung Raya. Sebagai salah satu badan pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik tentulah Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran yang sangat sentral dan sangat penting, namun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam pembangunan fisik infrastruktur jalan belum terlaksana merata di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Mesuji. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji dimulai dari kegiatan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrebang) masih kurang sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat. Penyusunan program pembangunan infrastuktur di Kabupaten Mesuji telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur yang mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal seperti program perbaikan infastruktur jalan dan jembatan yang belum menyeluruh di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Penyusunan pembiayaan/penyusunan anggaran proses pembangunan infrastruktur mengalami beberapa kendala, seperti adanya kekurangan anggaran sebesar Rp 3,1 milyar dari jumlah anggaran Rp 256 milyar yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Peranan Dinas Pekerjaan Umum, Pembangunan Infrastruktur Jalan**

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS (PU) MESUJI REGENCY ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (Studies in the district of Tanjung Raya)**

By  
Faisal Suhandi

The existence of the damaged infrastructure be a threat to people in the district of Mesuji. As one local government agencies that have a function in the physical development is certainly the Department of Public Works (PU) discount the role that is very central and very important, but at the Department of Public Works (PU) Mesuji District in the physical development of road infrastructure has not implemented evenly in each region in the district of Mesuji. The research objective was to determine the role of the Office of Public Works (PU) Mesuji district in Road Infrastructure Development.

This type of research is descriptive research, data have been obtained will then be analyzed descriptively a study that aims to create descriptive, picture or painting in a systematic, factual and accurate information on the facts, nature and the relationship between the phenomenon investigated.

Based on the results of research and discussion obtained policymaking infrastructure development in the district of Mesuji begins deliberation of activity Development Plan (Musrebang) is still not good and less in accordance with the plan that has been made. Preparation of program infrastructure development in the

district of Mesuji has been implemented in accordance with the purpose of infrastructure development, which has a vital role in realizing the fulfillment of people's basic rights, but in practice has not run optimally as program improvement of infrastructure of roads and bridges that have not been thorough in every district in the district of Mesuji, Preparation of financing/budgeting process of infrastructure development having some problems, such as the deficit budget of Rp 3.1 billion of the total budget of Rp 256 billion dollars in Revenue and Expenditure Budgets (APBD) in 2015, resulting in the implementation of the Public Works Department should Mesuji District seek additional budget outside the budget.

Keywords: Role of the Department of Public Works, Roads Infrastructure Development

**PERANANDINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KABUPATEN MESUJI  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
(Studi di Kecamatan Tanjung Raya)**

Oleh  
Faisal Suhandi

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

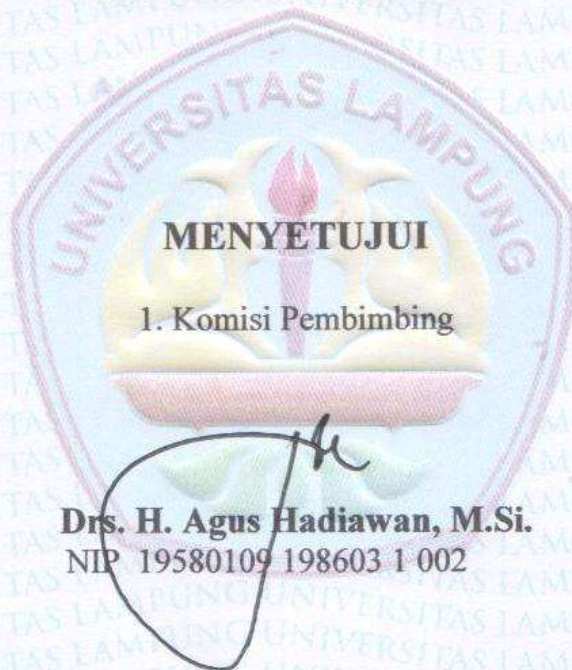
Judul Skripsi : **PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)  
KABUPATEN MESUJI DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN  
(Studi di Kecamatan Tanjung Raya)**

Nama Mahasiswa : **Faisal Suhandha**

No. Pokok Mahasiswa : **1116021039**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 19580109 198603 1 002

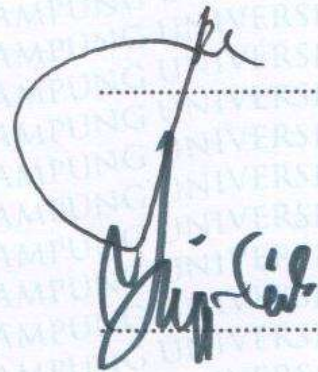
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**

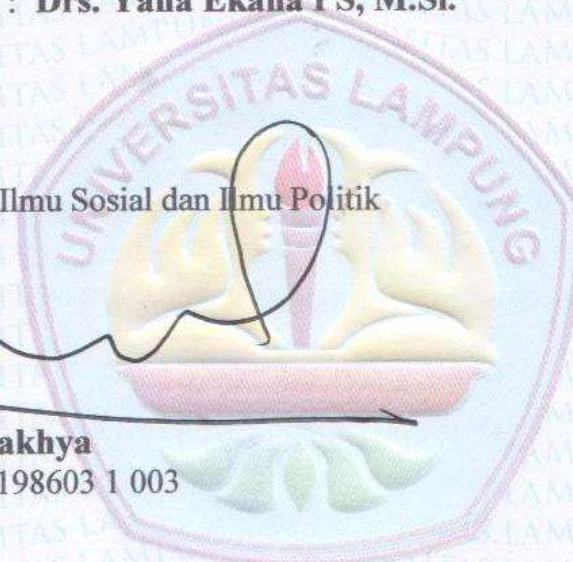


Penguji : **Drs. Yana Ekana PS, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **05 Desember 2016**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah saya tulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan,



**Faisal Suhandi**

**NPM. 1116021039**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis memiliki nama lengkap Faisal Suhandha, dilahirkan di Muara Tenang pada tanggal 7 juni 1993.

Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Maraondak Harahap dan Ibu Delimawarni Siregar.

Jenjang akademis penulis diselesaikan dari Sekolah TK Darmawanita Muara Tenang pada tahun 2000, Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Tenang pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simpang Pematang pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Utama 2 Bandar Lampung yang selesai tahun 2011. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat  
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita*

dan

*Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada*

Ayahanda ku Maraondak Harahap dan Ibunda ku Delimawarni Siregar, sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku. Terimakasih atas do'a dan restu yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini, dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan

Terimakasih untuk Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan Jannah dari Allah S.W.T.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Peranan Dinas Pekerja Umum (PU) Kabupaten Mesuji Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Study di Kecamatan Tanjung Raya )”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala yang telah engkau berikan kepada hamba, baik rezeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran daan semangat yang tiada henti. Hingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. A. Effendi, MM selaku Pembantu Dekan I, Prof. Dr. Yulianti, M.S selaku Pemabntu Dekan II, Drs. Pairul Syah, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih

bapak selalu mengingatkan penulis, memberikan semangat dan mengajarkan penulis arti perjuangan dan sabar yang sesungguhnya. Terima kasih selama ini sudah bersedia menjadi pembimbing yang sangat sabar dan hebat bagi Faisal, sehat selalu ya pak.

6. Bapak Drs. Yana Ekana PS M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala pelajaran yang membuat penulis menjadi semangat dalam menghadapi revisi. Pak Yana sehat terus ya pak.
7. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA selaku dosen pembimbing akademik penulis, terimakasih untuk semua bimbingan dan motivasinya bu, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu perkuliahan tetapi juga mengajarkan bagaimana bertahan dalam kesulitan hidup, terimakasih.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji selaku informan penelitian. Bapak Huminsa Lubis beserta keluarga terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Bapak Nazmul Fikri selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji yang telah banyak membantu penulis, sugih wibowo selaku .
10. Kedua orang tuaku, Ayahanda ku Maraondak Harahap dan Ibunda Delimawarni Siregar yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang

berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda serta memberikan manfaat bagi banyak orang.

11. Kakak ku Maya Armi April Lia Hrp Adik-adikku Rini Agustia Hrp ,Edi Ariansyah Hrp dan Mila dahliana Hrp . Terimakasih untuk keceriaan, dan kebersamaan yang kalian ciptakan ketika sedang mengalami kelelahan dan kepenatan. Semoga kalian bisa melampaui jauh capaian yang telah kakak raih.
12. Winingsih , Terimakasih doa, dukungan, kesabaran, motivasi dan waktunya selama ini yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi.
13. Temen seperjuangan delsen mandela,endi azis dan muhamad afif terima kasih atas dukungan dan motivasi dan waktunya selama ini yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi.
14. Temen temen gengs koprok Rio Anggar Deni,Dio Baleri,Adhe Nugraha,Yoga Adi Putra, Meta Orlando, Felix GA ,Kurnia Imam ,Kiki Anugrah, Rhendra ,Eko kece, dan Jeri Terimakasih telah memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa serta banyak cerita selama berjuang bersama di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Semoga kesuksesan dapat diraih, dan silaturahmi tetap terjaga.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Asrul , Ipenk dan pasukan bodrex Deta ,Anton ,Ower , Ami, Ojeb dan Kevin untuk . Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya

16. Seluruh teman-teman TK, SD, SMP dan SMA yang berada di Kabupaten Mesuji. Terimakasih untuk motivasi, dan pengalamannya sehingga Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
17. Teman-teman KKN Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Rafiq, Arifah, Bulan dan Ayu Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin .
18. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2016

Penulis,

**Faisal Suhanda**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis .....	6
2. Kegunaan Praktis .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Peranan.....	7
B. Konsep Pembangunan.....	8
1. Definisi Pembangunan .....	8
2. Perencanaan Pembangunan .....	11
3. Alur Perencanaan Pembangunan.....	15
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.....	22
5. Kualitas Perencanaan Pembangunan.....	23
C. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	29



C. Informan Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Wawancara Mendalam ( <i>in-depth interview</i> ) .....	31
2. Dokumentasi .....	32
3. Observasi .....	32
E. Teknik Pengolahan Data .....	32
1. <i>Editing</i> .....	32
2. Interpretasi .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	33
1. Reduksi data .....	34
2. Penyajian Data ( <i>Display Data</i> ) .....	34
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) .....	35

#### **IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji .....	36
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji .....	39
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum .....	39
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum .....	39
3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum .....	40
4. Struktur dan Tugas Organisasi .....	45
C. Gambaran Umum Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Mesuji .....	50
1. Sistem prasarana jaringan jalan .....	53
2. Rencana jaringan jalan kabupaten berupa jalan Lokal Primer .....	54
3. Sistem prasarana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	54
4. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tanjung Tanjung Raya .....	55

## **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	57
1. Proses Pembangunan.....	57
2. Indikator Hasil Pembangunan .....	71
B. Pembahasan.....	88
1. Proses Pembangunan.....	88
2. Indikator Hasil Pembangunan .....	92

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian .....	28

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan di bidang *public service* atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing (Anwar 2005).

Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

Pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self-supporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya

jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lambat dan tidak berkembang. Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang telah diuraikan diatas, maka instansi ini oleh pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka terbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum. Dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), maka instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji memiliki tugas pokok yaitu sebagai pembantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum.

Untuk melaksanakan tugas di atas maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, pengembangan serta Pengawasan di bidang Pekerjaan Umum; dan
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.

Mengerucut pada permasalahan yang ada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dimana infrastuktur yang ada seakan-akan luput dari

perhatian pemerintah dimana keadaan infrastruktur yang menjadi modal utama pendapatan daerah dapat dikatakan rusak dan sudah tak layak. Banyak permasalahan lain timbul akibat permasalahan di atas seperti naiknya tingkat kecelakaan yang terjadi akibat jalan yang rusak dan berlubang, pendapatan daerah yang tidak maksimal dan masih banyak lagi. Hal ini dibuktikan pada artikel yang dimuat di <http://www.tvlampungku.com> yang diakses tanggal 12 September 2015 yang menjelaskan banyaknya korban kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan di kecamatan Tanjung Raya pada tiga bulan terakhir mencapai 43 kasus kecelakaan.

Banyak jalan di wilayah Mesuji yang belum dapat diakses oleh warganya, bahkan ada kesan jalan-jalan yang ada di jalur ekonomi dibiarkan rusak. Akibatnya, warga Mesuji sendiri merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Menurut salah satu warga yaitu Udin (40) selaku warga Muara Tenang, menuturkan, dirinya heran melihat keadaan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mesuji yang keadaannya bertambah parah. “Dulu jalan ini mau dibangun, namun sampai saat ini belum juga disentuh,” ungkap Udin (<http://www.lampungtoday.com/go/today-news/5225-infrastruktur-jalan-di-mesuji-seperti-dianaktirikan.html>, diunduh tanggal 10 Desember 2015 Pukul 15.12 WIB).

Hal di atas membuktikan bahwa keberadaan infrastruktur yang rusak menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Mesuji. Sebagai salah satu badan pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik tentulah Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran yang

sangat sentral dan sangat penting, namun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam pembangunan fisik infrastruktur jalan belum terlaksana merata di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Mesuji.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dimana banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, sehingga saat hujan menjadi becek dan licin serta sulit dilalui kendaraan bermotor. Sejumlah warga Mesuji, selain mengeluhkan jalan yang rusak parah, dengan becek dan licin itu, mempertanyakan pula pengerjaan talut di sepanjang jalan provinsi di daerah itu yang telah rusak dan hancur setelah diguyur hujan lebat padahal belum selesai dikerjakan. kondisi jalan yang ada di Kecamatan Tanjung Raya yang mengalami kerusakan dan yang telah diperbaiki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Kondisi Jalan yang Mengalami Kerusakan di Kecamatan Tanjung Raya

No	Desa	Jalan rusak (km)
1	Muara Tenang	7
2	Gedung Ram	4
3	Mekar Sari	6
4	Sinar Laga	17

Sumber: Mesuji Dalam Angka Tahun 2015

Selain itu warga di Kecamatan Tanjung Raya Mesuji mempertanyakan kualitas pengerjaan talut di jalan yang telah hancur setelah diguyur hujan, sehingga membuat kondisi jalan yang rusak menjadi semakin parah, becek, dan licin. Talut yang hampir rampung pengerjaannya tersebut, kini hanya tersisa puing-puing berupa bongkahan semen. Talut tersebut merupakan pekerjaan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji melalui

Bidang Cipta Karya. Menurut masyarakat setempat, pembuatan talut tersebut diduga tak sesuai rencana anggaran dan biaya (RAP) atau bestek yang telah ditentukan, setidaknya hal itu terlihat dari proses pengerjaan semestinya pembuatan talut dengan adukan semen dan pasir serta susunan batu yang tepat (Hasil Prariset Peneliti, 2016).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, 2015).

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik



mengakibatkan problem sosial dan lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **Peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoritis dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi ilmu pengetahuan dan bagi penelitian yang akan mengangkat mengenai peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Fisik Pada Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2015

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Peranan

Konsep peranan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Horton dan Hunt yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan (Horton dan Hunt, 2007: 116).

Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi (Suatu Pengantar)* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2007: 221).

Aspek-aspek peranan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2007: 153).

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006: 751).

Berdasarkan uraian definisi tersebut di atas, peranan merupakan perilaku seorang, individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut yang diembannya. Peranan juga merupakan suatu konsep dari apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal ini menurut penulis peranan lebih didefinisikan pada fungsi sebagai suatu organisasi. Maka dengan demikian, peranan dapat diukur dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi atau lembaga.

## **B. Konsep Pembangunan**

### **1. Definisi Pembangunan**

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005: 59).

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri kemiskinan dan ketidak mampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan

mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat.

Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, kebijakan pertanian dan pedesaan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar dan biaya-biaya transaksi (Anwar, 2005: 79).

Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak

pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan-kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1) pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan (Wresniwiro, 2007: 78).

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan pada ruang kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan (Tjokroamidojo, 2003: 78).

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan

dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud (Wresniwiro, 2007: 47).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang, pangan, papan. Dimana sebagaian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah. Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non fisik.

## **2. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Berdasarkan aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, selengkapnya sebagai berikut: Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

Perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah (Miraza, 2005: 114).

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat (Munir, 2002: 47).

Struktur politik di daerah (kabupaten/kota) tercermin dalam bentuk pemerintahan daerah otonom. pemerintahan daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Fungsi mengatur dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi mengurus dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal. Aktor yang terlibat

terdiri dari pemerintah daerah terdiri *Elected Official*/Pejabat Politik (Kepala Daerah dan DPRD) dan *Appointed Official* (Birokrasi) (Nurcholis, 2005: 114).

Kepala Daerah adalah pemimpin birokrasi daerah yang tugasnya menetapkan kebijakan bersama dengan DPRD serta memimpin pelaksanaannya bersama dengan jajaran birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah berkewajiban antara lain: (1) menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, (2) meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, (3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, (4) mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD.

Kepala Daerah ini berperan sebagai *top manager*, *top manager* bertanggungjawab terhadap perusahaan (pemerintah daerah) secara keseluruhan, dengan tugas utama yaitu menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. *Top manager* lebih berperan dalam merumuskan perencanaan strategis, sedangkan birokrasi lebih berperan dalam perencanaan operasional. Legislatif adalah forum yang sangat penting dimana masalah masyarakat dan kebijakan di alamatkan kepadanya untuk diminta. Sebagian besar kebijakan yang dipersiapkan oleh eksekutif terutama yang bersifat makro atau mempunyai dampak bagi masyarakat, membutuhkan pengesahan dari legislatif (Amirullah, 2004).

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, dibedakannya dalam beberapa model yaitu:

#### 1) *Technical Bureaucratic Planning*

Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang



terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

2) *Political Influence Planning*

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.

3) *Social Movement Planning*

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.

4) *Collaborative Planning*

Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama (Innes, 2006: 47).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah- langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan

untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

### **3. Alur Perencanaan Pembangunan**

Model perencanaan yang rasional terdiri dari 6 (enam) langkah, sebagai berikut:

*a. Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

*b. Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

*c. Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

*d. Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternative tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

*e. Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-

masing alternatif tindakan.

*f. Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan (Mayer, 2009: 78).

Perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (*policy making*). Bahkan keduanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah (Mayer, 2009: 78).

Proses perencanaan dibagi dalam beberapa tahap (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (*agenda setting*), (c) perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan (f) penilaian kebijakan (Islamy, 2003: 78).

a. Perumusan Masalah

Masalah tidak dapat terumuskan dengan sendirinya. Para pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah yang berupa pendapat-pendapat atau keinginan anggota masyarakat, sehingga kemudian dapat merumuskan masalah kebijakan tersebut dengan benar (Dimock dalam Sunarko, 2006: 47).

Tidak semua permasalahan akan dipilih untuk diselesaikan. Untuk dapat memilih masalah mana yang akan diselesaikan diperlukan langkah-langkah perumusan masalah adalah: (1) Mengidentifikasi masalah. Masalah

merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus di atasi/dipecahkan (2) Mengidentifikasi masalah umum. Masalah Umum atau problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi serta mempunyai akibat yang luas kepada masyarakat (3) Mengidentifikasi Isu. Isu adalah masalah yang dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu (Islamy, 2003: 78).

Untuk dapat merumuskan masalah tersebut dibutuhkan kemampuan-kemampuan para aktor yang meliputi: (a) kesadaran dan kepekaan masyarakat untuk melihat problemnya sendiri, (b) kesadaran, kepekaan dan kemampuan pembuat keputusan melihat problem yang dihadapi masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya untuk diatasi (Islamy, 2003: 78).

b. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Isu dapat masuk ke dalam pengambil keputusan melalui dua agenda yaitu: (1) *Systemic Agenda*, mencakup seluruh isu yang sedang dibicarakan secara luas, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pemerintah (2) *Institutional Agenda*, bahwa isu tersebut sudah menjadi diterima oleh pengambil keputusan dan sedang dirumuskan cara pemecahannya (Lester, 2006).

Pengelolaan isu meliputi: (a) *Outside initiation model*. Isu berasal dari luar pemerintah, yang kemudian dikembangkan ke dalam *systemic agenda* dan akhirnya masuk dalam *institutional agenda*. Dalam tipe ini peran kunci

dipegang oleh kelompok sosial (*b*) *Mobilization model*. Dalam model ini inisiatif berasal dari pemerintah, namun pemerintah meminta dukungan dari masyarakat. Isu masuk dulu ke *institutional agenda*, baru kemudian ke *systemic agenda* (*c*) *Inside initiation model*. Inisiatif berasal dari pemerintah, dan langsung dimasukkan dalam *institutional agenda* (Howlett, 2005: 114).

c. Perumusan Usulan Kebijakan (*Policy Proposals*)

Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam kegiatan ini berupa (1) mengidentifikasi alternatif, (2) mendefinisikan dan merumuskan alternatif, (3) menilai alternatif, (4) memilih alternatif yang memuaskan (Islamy, 2003: 78).

Langkah-langkah yang disampaikan Islamy di atas adalah model rasional komprehensif. Model lainnya adalah inkremental yang ditempuh apabila ada keterbatasan waktu, biaya dan informasi yang dimiliki. Model ini bersifat upaya untuk memodifikasi terhadap program-program yang sudah ada. (Solichin, 2004: 45).

d. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Usulan kebijakan akan menjadi kebijakan (*policy decision*) yang sah bila sudah diadopsi atau diberi legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh pihak legislatif. Rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu.

Tiga pola tersebut adalah: (1) Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis (2) Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja (3) Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

Memperhatikan pedoman-pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima tahapan yaitu (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan tahapan perencanaan. Selengkapnya proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:

a) Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Tinjauan keadaan, (2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (4) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (5) Persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan

dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan dsb) yang diperlukan untuk itu. Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan. Penyusunan pembiayaan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Abdullah (2005: 114) anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja (dan pembiayaan), sedangkan *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan

sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2010: 94).

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi: (1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan program/kegiatan, (2) Penyusunan rancangan APBD, (3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, (4) Penetapan APBD (Kepmendagri 29/2002).

Namun sebelum terjadi proses penganggaran berbentuk menjadi kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja sampai dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan, diteruskan ke Tingkat Kecamatan dan akhirnya di Tingkat Kota.

Berdasarkan beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tahap-tahap:

a. *Penyusunan Agenda Setting*

*Local Development Planning* menyebutkannya sebagai *local policy statement* yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan politik yang berfungsi memberikan arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Langkah-langkah penetapan kebijakan yaitu (1) tinjauan keadaan dan perumusan masalah (2) penetapan tujuan, (3) penetapan arah kebijakan yang berisi cara- cara/strategi yang bersifat indikatif (GTZ,



2006: 47).

b. Penyusunan *policy formulation*

Sebagai *local development program* yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan administratif sebagai pelaksanaan dari kebijakan (*agenda setting*) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah (1) penentuan tujuan program dengan mengacu kepada *local policy statement* (2) Penilaian atas kebutuhan (3) Penentuan sasaran program (4) penentuan kegiatan- kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program tetap berpedoman kepada asas prioritas (GTZ, 2006: 47).

c. Penyusunan *Budgeting*

Anggaran adalah proses penjabaran rencana kerja ke dalam angka kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian (GTZ, 2006: 47).

#### **4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Menurut Peraturan Bersama: Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

## 5. Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan yaitu: (a) Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, (c) Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Tujuan mengidentifikasi lima pendekatan perspektif kualitas yaitu: (a) *Transcendental Approach*, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur (b) *Product Based Approach*, adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, (c) *User Based Approach*, adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera (*fitness for used*) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi (d) *Manufacturing Based Approach*, adalah bersifat *supply based* atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur (Yamit, 2010: 94).

Untuk mengukur kualitas rencana Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para *stake holders* nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada (Keban, 2010: 94).

Perencanaan yang ideal harus memenuhi: (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi

harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus- menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*), (e) terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*) (Solihin, 2008: 45).

Syarat perencanaan harus: (a) faktual dan realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada (b) logis dan rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti, (c) fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memperhatikan kendala dan limitasi lingkungan sosial maupun fisik, (d) objektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum (e) komprehensif atau menyeluruh (Solihin, 2008: 45).

Pembaharuan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pokok dalam manajemen pembangunan, antara lain:

- 1) Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- 2) Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- 3) Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan;
- 4) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik;

- 5) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri (Bappenas, 2003: 78).

Koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) sebagai arah kebijakan umum APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan mengacu pada: Program Pembangunan Daerah (Propeda); Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program. Untuk keperluan koordinasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota (Bappenas, 2003: 78).

Kualitas RKPD menunjukkan kinerja tenaga perencana pada masing-masing SKPD. Berdasarkan pedoman koordinasi pembangunan nasional disebutkan bahwa dalam penetapan tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip SMART, yaitu:

- a. Tujuan harus bersifat khusus, spesifik (*specific*)
- b. Tujuan tersebut harus terukur (*measurement*)
- c. Tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (*achievable*)
- d. Tujuan tersebut harus realistis, rasional dan logis (*realistic*)
- e. Tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (*timely*) (Bappenas, 2003: 78)

### C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan Surat bersama dari Bappenas dan Depdagri Nomor 1181/M-PPN/02/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Propinsi dan Kabupaten/ Kota, bahwa pada dasarnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten/ Kota terbagi di tiga tempat yaitu: (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Desa/Kelurahan (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan dan (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten Mesuji sejak dari level pemerintah kelurahan sampai dengan di level kota berbagai permasalahan baik prosedur, teknis maupun pengambilan kebijakan bisa terjadi. Permasalahan bisa datang dari masyarakat, pengurus RT/RW, birokrasi di masing-masing level pemerintahan, Tim Pelaksana Musrenbang maupun dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kondisi ini akan berpengaruh terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi program/kegiatan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

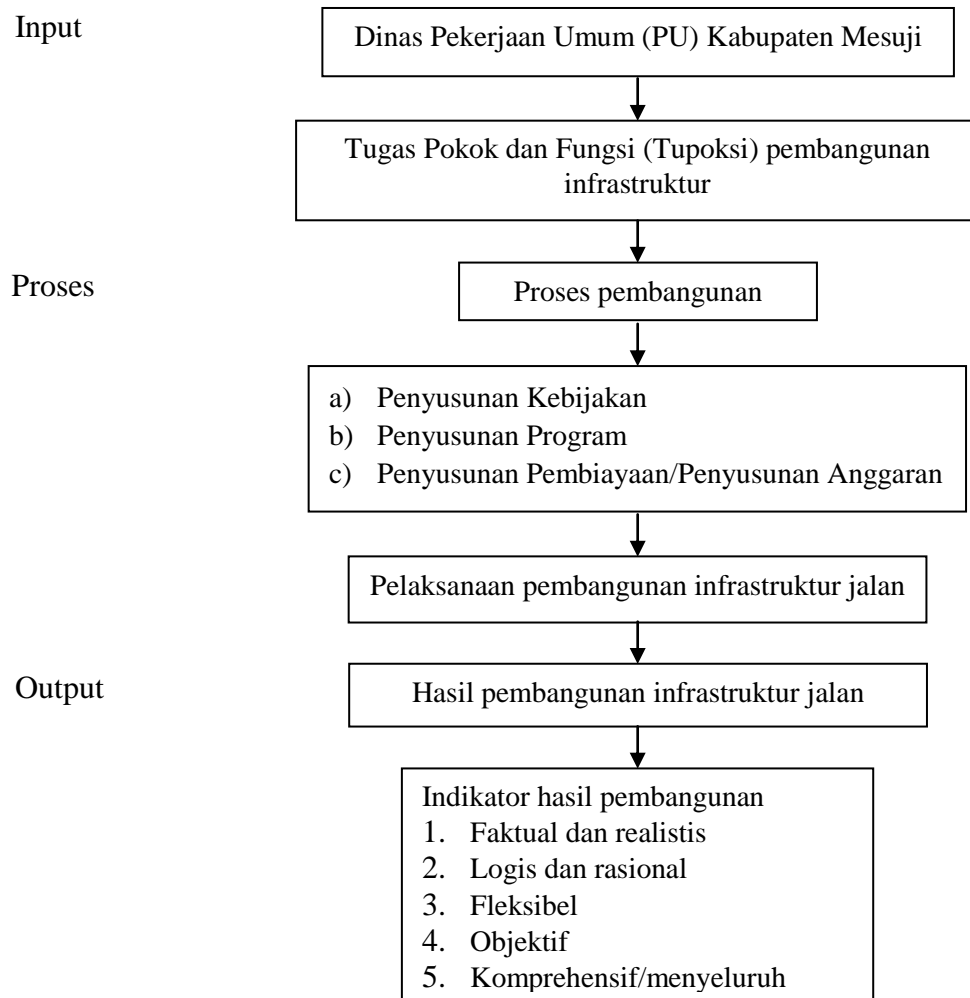
Kelompok masyarakat dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud dapat menyerap aspirasi dari para peserta musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD. Usulan dari setiap SKPD inilah kemudian di bawa dalam Forum SKPD dan *Focus Group Discussion* (FGD) dimana kegiatan ini

merupakan cerminan forum Pra Musrenbang Tingkat Kota.

Penyelenggaraan Forum SKPD dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang pokok yaitu: (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Prasarana Wilayah, (4) Penanggulangan Kemiskinan dan (5) Gabungan selain dari ke empat bidang tersebut sebelumnya. Hasil dari Forum SKPD dan FGD inilah selanjutnya menjadi Rencana Kerja di setiap SKPD dan dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk di “Musrenbangkan” pada tingkat Kota. Pada akhirnya kesepakatan di Musrenbang Kota inilah diolah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yang final sebagai rujukan untuk penyusunan RAPBD.

Selanjutnya dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Mesuji yang melibatkan berbagai *stakeholders* dari unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU), swasta sebagai rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Pada permulaan proses perumusan kegiatan tahunan yang disampaikan pada forum Musrenbang baik di Kelurahan, Kecamatan maupun di kota, *stakeholders* yang terlibat cukup lengkap yaitu meliputi unsur masyarakat, ketua RT/RW, LSM, pihak swasta, Perguruan Tinggi, SKPD dan unsur DPRD. Pada tahap perumusan prioritas kegiatan unsur yang terlibat hanya diikuti oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Unsur DPRD. Pada tahap akhir dalam proses perencanaan pembangunan yaitu ditetapkannya APBD Tahun 2010 unsur yang terlibat dalam proses ini juga hanya diikuti oleh Tim Anggaran Eksekutif dan unsur DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu (Nazir, 2008: 63).

Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan terdiri dari:

1. Proses pembangunan:
  - a. Penyusunan Kebijakan



- b. Penyusunan Program
  - c. Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran
2. Indikator hasil pembangunan:
- a. Faktual dan realistis
  - b. Logis dan rasional
  - c. Fleksibel
  - d. Objektif
  - e. Komprehensif/menyeluruh

### **C. Informan Penelitian**

Dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang dimintai informasi disebut informan. Di dalam Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172), yang dimaksud dengan informan kunci (*key informan*) adalah orang yang memberi informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Pada penelitian ini informan terdiri dari:

1. Huminsa Lubis selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
2. Nazmul Fikri selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
3. Sugih Wibowo selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
4. Agung Subandara selaku Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji

5. Wawan Suhendra selaku Kepala Bidang Alkal Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
6. Martha Ardiansyah selaku pemilik CV Cheby Karya pelaksana pembangunan jalan di Kecamatan Tanjung Raya.

Pemilihan kelima informan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui jelas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini khususnya mengenai pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)**

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai narasumber penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi dengan menggunakan panduan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
- b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
- c. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
- d. Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
- e. Kepala Bidang Alkal Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji
- f. Pihak kontraktor CV Cheby Karya

## 2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan, dokumentasi foto hasil penelitian dan berita-berita dari media massa.

## 3. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji.

## E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Maleong (2008: 38). adalah:

### 1. *Editing*

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

## **2. Interpretasi**

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan yang dikembangkan oleh peneliti.

Pada kegiatan interpretasi ini peneliti melakukan analisis hasil penelitian berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil tersebut dibuat secara sistematis mulai dari penyajian data, analisis data penelitian dan teori penunjang dari hasil penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:93).

Terdapat tiga komponen analisis yaitu:

### **1. Reduksi data**

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Milles dan Huberman, 1992:16).

Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

### **2. Penyajian Data (*Display Data*)**

Penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik

dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih (Milles dan Huberman, 1992:16).

Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

### **3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh dan kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti (Milles dan Huberman, 1992:16).

Penulis melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data-data mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh pada permasalahan penelitian yang dibahas.

## **IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji**

Kabupaten Mesuji merupakan daerah otonomi baru Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-undang No 49 tahun 2008. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Provinsi Lampung dengan luas wilayah 2.184 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 75 desa, dengan mayoritas daerah berupa dataran rendah yang sangat cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan.

Infrastruktur transportasi darat didukung jalan Lintas Timur dan Jalur Sungai Mesuji merupakan transportasi jalur ekonomi barang dan jasa antar kampung. Berdasarkan pemanfaatan geografisnya, saat ini di Mesuji tengah berkembang agroindustri seperti perusahaan besar swasta di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, industri tapioka dan tambak udang yang berada di perbatasan kabupaten Mesuji yang berskala Asia, dengan pangsa pasar Nasional dan manca Negara. Kabupaten Mesuji secara langsung berbatasan dengan berbagai daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan,

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang serta Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan.

Untuk saat ini wilayah Mesuji masih terbagi menjadi tujuh kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar per kecamatannya. Di masa yang akan datang jumlah kecamatan tersebut masih bisa bertambah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan Kabupaten Mesuji.

Penduduk suatu daerah menjadi sangat krusial fungsinya bagi pemerintah daerah. Mengingat sifatnya yang sangat penting, kondisi penduduk menjadi salah satu tolak ukur pemerintah daerah dalam mengambil berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan. Dengan luas wilayah Kabupaten Mesuji sekitar 2.184 kilometer persegi yang didiami oleh 187.407 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji adalah sebanyak 86 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanjung Raya yaitu sebanyak 143 jiwa per kilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Mesuji Timur yaitu sebanyak 37 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Way Serdang dengan jumlah penduduk 40.928 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Panca Jaya dengan jumlah penduduk 15.355 jiwa. Pertumbuhan penduduk per kabupaten tahun 2010 berjumlah 1,02.



Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor-ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah.

Perekonomian di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini ditunjang oleh berbagai kegiatan sektor produksi diantaranya adalah: sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Perkembangan kegiatan ini didukung oleh karakteristik fisik wilayah yang masih memiliki areal lahan terbuka yang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar (80%) penduduk Mesuji adalah petani (primer). Hal ini bersesuaian dengan struktur ekonomi yang tergambar dari komposisi sektor usaha pada PDRB dimana sektor pertanian adalah penyumbang terbesar (40%).

Sektor pertanian dan perdagangan adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mesuji. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mesuji pada tahun 2010 sebesar 2.516.150.000 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2012 yaitu sebesar 4.589.700.00. Dengan nilai PAD seperti tersebut Kabupaten Mesuji masih membutuhkan bantuan dana dari pusat untuk menalakan pemerintahan di Kabupaten Mesuji.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji**

### **1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum**

Sejarah Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, kementerian atau departemen disertai tugas untuk menangani masalah perencanaan pembangunan infrastruktur menuju daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan aksesibilitas daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP/150/A/KPTS/1966, maka pada tanggal 3 Desember 1966 ditetapkan sebagai Hari Kebaktiaan Pekerjaan Umum atau lebih dikenal dengan Hari Bakti. Pembangunan daerah pada periode awal dimana disebutkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

### **2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Mesuji merupakan lembaga teknis daerah Kabupaten Mesuji yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mesuji melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Mesuji. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Mesuji di bidang pembinaan pekerjaan umum daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Mesuji
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai petunjuk Bupati

### **3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum**

#### **a. Visi Dinas Pekerjaan Umum**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah rumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Visi dapat mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji menyatakan Visi adalah sebagai berikut :*”Terwujudnya daya dukung Infrastruktur yang handal dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji “*.

**b. Misi Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas organisasi.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Jalan, Pengairan , dan Cipta Karya.
- 3) Memelihara, meningkatkan dan membangun prasarana jalan dan jembatan untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang prasarana wilayah.

- 4) Memelihara, meningkatkan, merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana pengairan, meliputi irigasi, embung, bendung, dan bangunan pengendali banjir guna meningkatkan produksi pertanian.
- 5) Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni dan membangun/memelihara bangunan gedung pemerintah serta gedung pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan izin mendirikan bangunan.

**c. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :

Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dalam pencapaian tujuan :

- 1) Menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Mesuji.
- 2) Membina dan memotivasi peningkatan kerja.
- 3) Merumuskan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.
- 4) Mengkoordinasikan kerjasama di bidang pekerjaan umum dengan instansi terkait.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kegiatan pekerjaan umum.

- 6) Memberi saran dan pertimbangan pada atasan dalam rangka mengatasi masalah di bidang pekerjaan umum daerah.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum Daerah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun cara pencapaian tujuan merupakan strategi dari suatu organisasi untuk dapat merealisasikan tujuan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan.

#### **d. Strategi Dinas Pekerjaan Umum**

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :

##### 1) Lingkungan Internal

###### a) Kekuatan

- (1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- (2) Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventarisasi Kantor)
- (3) Pembiayaan (Anggaran)
- (4) Komitmen Pimpinan Organisasi
- (5) Konsep perencanaan yang baik

###### b) Kelemahan

- (1) Masih kurangnya SDM yang mengambil alih pekerjaan-pekerjaan teknis maupun kelembagaan (Tenaga ahli)

- (2) Belum terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan.
- (3) Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.
- (4) Inkonsistensi pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan.
- (5) Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati.

## 2) Lingkungan Eksternal

### a) Peluang

- (1) Konsultan.
- (2) Dinas, Departemen, dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Komitmen DPR.
- (4) Komitmen Pimpinan Daerah.
- (5) Kondisi alam/lingkungan.

### b) Ancaman

- (1) Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan baik peralatan maupun ahli.
- (2) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek.
- (3) Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran proyek yang maksimal.

- (4) Kebijakan Pimpinan Daerah yang tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

#### **4. Struktur dan Tugas Organisasi**

##### **a. Struktur Organisasi**

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji terdiri dari :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas.
- 2) Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
  - a) Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Seksi Peralatan, Perbekalan dan Perbengkelan.
  - b) Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Perumahan dan Lingkungan Perumahan, Seksi Pengelolaan Air Bersih.



- c) Bidang Pengairan yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan Pantai.
- d) Bidang Tata Kota yang terdiri dari Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi, Seksi Perizinan, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Registrasi, Sertifikasi, dan Perizinan SDK.

#### **b. Tugas Organisasi**

Tugas Pokok masing-masing struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas memimpin dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya, agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pekerjaan umum dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang pekerjaan umum.

##### 2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji mempunyai tugas pokok yaitu melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,

perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan, protokol, dan pembuatan laporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, pemeliharaan, angkutan, keamanan serta urusan persuratan serta kearsipan.

4) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dinas, pembukuan dari pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

5) Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas sekretariat dalam menyusun program kerja dinas.

6) Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Marga adalah melakukan

koordinasi penyusunan program kerja dinas di bidang perumusan perencanaan kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pembina Umum, pemberian bimbingan dan pelayanan di bidang bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Kepala Dinas serta pengawasan dan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Marga.

7) Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi

Tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi adalah melaksanakan sebagian tugas bidang bina marga di bidang kegiatan penyelenggaraan perencanaan teknis, dokumentasi dan pelaksanaan pembangunan, jaringan jalan dan jembatan dalam lingkungan dinas pekerjaan umum, pengadaan, pengembangan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan kepala bidang bina marga serta menganalisa perhitungan konstruksi dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap pelaksanaan jaringan jalan dan jembatan dan melakukan studi kelayakan serta menetapkan harga dasar monitoring secara berkala hasil perencanaan jalan dan jembatan.

8) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tugas pokok Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan sebagai tugas bidang bina marga. Kegiatan pelaksanaan penyusunan program analisa dan evaluasi

pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan akibat bencana alam serta pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.

9) Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas pokok Bidang Cipta Karya adalah melaksanakan koordinasi program kerja dinas di bidang perumusan perencanaan kebijaksanaan pembangunan dan pengelolaan Pembina umum, pemberian bimbingan dan pelayanan di bidang cipta karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan cipta karya.

10) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung, Perumahan dan Lingkungan Perumahan.

11) Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih

12) Kepala Bidang Pengairan

Tugas pokok Kepala Bidang Pengairan adalah melakukan Koordinasi penyusunan program kerja di bidang perumusan, menyusun program perencanaan kebijakan serta pembinaan atau bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi dan pemeliharaan serta pengamanan perairan.

### 13) Kepala Bidang Tata Kota

Tugas pokok Kepala Bidang Tata Kota adalah melakukan koordinasi penyusunan kerja dinas bidang perencanaan evaluasi rencana kota, pemetaan, pengukuran dan dokumentasi rencana kota advice izin pembangunan laut dan pantai, membuat rekomendasi dan menerbitkan izin keterangan rencana kota.

### **C. Gambaran Umum Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Mesuji.**

Pengelolaan jaringan jalan di Provinsi Lampung secara umum berdasarkan dan berpedoman pada asas Desentralisasi (jalan/jembatan provinsi) dan asas Dekonsentrasi (Jalan/Jembatan Provinsi). Status jalan provinsi yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000, status jalan nasional ditetapkan dengan SK Menteri Permukiman Prasarana Wilayah No.376/KPTS/M/2004 Tanggal 19 Oktober 2004, sedangkan status jalan kabupaten ditetapkan dengan SK Gubernur Lampung No.G/186/B.VI/HK/2000 Tanggal 13 Juni 2000.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD). Akhirnya Pemerintah Kabupaten Mesuji menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.Berkaitan

dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji berupaya menyusun renstra sebagai penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Institusi dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Mesuji.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam rangka mewujudkan pelayanan terutama bidang penyediaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas dan perekonomian masyarakat adalah dengan membangun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah para aparatur lembaga atau dinas yang terkait mengurus masalah ke-PUan. Meningkatkan fungsi transparansi dan akuntabilitas program ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan stakeholders untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik. Pada masa itu, diharapkan telah terbangun sistem informasi dan manajemen pekerjaan fisik pembangunan daerah. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik telah berjalan efektif. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Paradigma perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mesuji menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up*, dan *top down process*. Perencanaan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel ; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang

perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Implementasi ini berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang perencanaan pembangunan strategis menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Infrastruktur jalan merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah/wilayah. Bertolak dari hal tersebut, pembangunan infrastruktur merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan,

sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kebijakan pembangunan infrastruktur disuatu daerah seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah lewat pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan bagi anggaran belanja pembangunan termasuk APBD maupun APBN. Oleh karenanya, komitmen Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur merupakan program prioritas yang tepat, sehingga harus didukung dengan manajemen yang baik dan bertanggungjawab agar dapat berjalan dengan sukses demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

#### **1. Sistem prasarana jaringan jalan**

Sebelum merumuskan rencana pengembangan jaringan jalan, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu sistem jaringan yang ada dan dikaitkan dengan rencana sistem pusat-pusat perkotaan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Rencana jaringan jalan nasional berupa jalan Arteri Primer yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Palembang melalui Simpang Pematang melalui ruas jalan Kecamatan Way Serdang-Mesuji Timur-Simpang Pematang;
- b. Rencana jaringan jalan provinsi berupa jalan Kolektor Primer 2 : pengembangan ruas jalan Simpang Pematang-Wiralaga (38,46 Km) dan ruas jalan Wiralaga-Mesuji Timur-Rawa Jitu Utara-Rawa Jitu - Teladas-Pasiran Jaya.



## **2. Rencana jaringan jalan kabupaten berupa jalan Lokal Primer**

Rencana jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi :

- a. Jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi:
  - 1) Ruas jalan Simpang Pematang - Pancajaya - Mesuji;
  - 2) Ruas jalan Simpang Pematang-Way Serdang; dan
  - 3) Ruas jalan Tanjung Raya-Mesuji Timur-Rawajitu Utara.
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ke pusat pemerintahan, meliputi:
  - 1) Perkotaan Mesuji-Mesuji Timur-Rawajitu Utara; dan
  - 2) Perkotaan Mesuji-Tanjung Raya-Panca Jaya-Simpang Pematang-Way Serdang.

Jalan lokal primer yang menghubungkan ke pusat pertanian (agropolitan), meliputi:

- 1) Perkotaan Mesuji-Mesuji Timur-Rawajitu Utara; dan
- 2) Perkotaan Mesuji-Simpang Pematang-Pancajaya - Way Serdang.

Rencana jembatan di Kabupaten Mesuji meliputi:

- 1) jembatan yang menghubungkan Kecamatan Rawajitu Utara-Mesuji Timur; dan
- 2) Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Mesuji Timur-Kecamatan Mesuji.

## **3. Sistem prasarana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Mesuji, meliputi:

- a. Mengembangkan jaringan trayek angkutan orang pada trayek utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan Mesuji (Wiralaga)-Simpang Pematang - Bandar Lampung;
- b. Membuka jaringan trayek baru angkutan orang yang menghubungkan antara simpang pematang dengan wiralaga, Mesuji Atas-simpang Pematang, Mesuji-Palembang, Mesuji-Bandar Lampung, Mesuji atas Bandar Lampung.
- c. Mengembangkan moda transportasi jalan melalui penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dengan penyediaan angkutan masal berbasis jalan terutama untuk trayek utama dan trayek cabang; dan
- d. Mengembangkan jaringan lintas angkutan barang antar wilayah kabupaten/kota, wilayah kecamatan dan wilayah perdesaan.

#### 4. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tanjung Tanjung Raya

Kondisi Jalan yang Ada di Kecamatan Tanjung Raya yang Mengalami Kerusakan dan yang telah diperbaiki

No	Desa	Jalan rusak (km)	Diperbaiki (km)
1	Muara Tenang	7	7
2	Gedung Ram	4	4
3	Mekar Sari	6	5
4	Sinar Laga	17	10
5	Bujung Buring	29	23
6	Sri Tanjung	15	13
7	Harapan Mukti	25	19

Sumber: Mesuji Dalam Angka Tahun 2015

Perbaikan jalan yang telah dilaksanakan di Desa Muara Tenang dan Desa Gedung Ram telah selesai sesuai dengan panjang jalan yang rusak, sedangkan untuk Desa Mekar Sari sepanjang 5 km, Desa Sinar Laga mencapai sepanjang

10 km, Desa Bujung Buring sepanjang 23 km, Desa Sri Tanjung sepanjang 13 km dan Desa Harapan Mukti sepanjang 19 km, perbaikan pada ketujuh desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raya dilakukan dengan meratakan jalan yang rusak parah dengan batu-batu split (*onderlag*), sedangkan jalan yang rusaknya tidak terlalu parah digunakan sistem tambal sulam dengan aspal.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peranan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji dalam pembangunan infrastruktur jalan masih kurang baik dalam menjalankan tugasnya guna merealisasikan pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji dimulai dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) masih kurang baik dan kurang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
2. Penyusunan program pembangunan infrastuktur di Kabupaten Mesuji telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur yang mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal seperti program perbaikan infastruktur jalan yang belum menyeluruh di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Realisasi perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Tanjung Raya mencapai 78,64% dari target 100% yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji.
3. Penyusunan pembiayaan/penyusunan anggaran proses pembangunan infrastruktur mengalami beberapa kendala, seperti adanya kekurangan

anggaran sebesar Rp 3,1 milyar dari jumlah anggaran Rp 256 milyar yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji sebaiknya melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebab hal tersebut tidak akan terjadi bila pengawas di Dinas Pekerjaan Umum pro-aktif dalam menjalankan tugasnya, diharapkan bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Mesuji dapat memasukkan aspirasi dari masyarakat terutama mengenai kondisi infrastruktur yang ada di daerahnya masing-masing.
2. Adanya beberapa perubahan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dari tahun sebelumnya serta ditambah adanya penambahan pembangunan infrastruktur lainnya, sebaiknya dinas pekerjaan umum Kabupaten Mesuji melakukan internal audit untuk mengetahui penyebab adanya peningkatan pengeluaran dalam pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu diharapkan adanya penyempurnaan program dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Mesuji dan bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Dinas Tata Kota dan Dinas Pendidikan dalam rangka kerjasama dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur jalan.
3. Banyaknya kerusakan jalan yang terjadi hampir setiap jalan di Kabupaten Mesuji, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan sesuai standar teknisnya dan penyelesaian permasalahan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur jalan yang menjadi faktor utama dalam menghambat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebaiknya pemerintah Kabupaten Mesuji menyusun anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dengan mempelajari kondisi dan evaluasi anggaran yang ada di tahun sebelumnya, sehingga perencanaan anggaran akan sesuai dengan hasil pelaksanaan program yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTKA

- Amirullah, 2004, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar 2005. *Evaluasi Kinerja*. Refika Aditama. Bandung
- Bappenas, 2003, *Kebijakan Nasional Pembangunan Prasarana Dan Sarana Air. Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga*. Jakarta.
- Bastian, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji, 2015, *Profil Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Mesuji*.
- GTZ, 2006, *Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan. Ekonomi Daerah Berdaya Saing*. Jakarta
- Horton dan Hunt, 2007. *Sosiologi Jilid I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Persada
- Howlett, 2005, *Studying Public Policy: Policy Cycles*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta
- Innes, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Islamy, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006, Balai Pustaka, Jakarta.
- Keban, 2010, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lester, 2006, *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Australia :Wadsworth.
- Maleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mayer, 2009, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Edisi Terjemahan. Jakarta : Bumi Aksara
- Milles dan Huberman, 1992, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

- Miraza, 2005, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI. Bandung.
- Munir, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta
- Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 2007, *Metode Penelitian. Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Gaya Media Jogyakarta
- Sirojuzilam dan Mahalli, 2010, *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers Jakarta.
- Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Solihin, 2008, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Revisi Jakarta : Bumi Aksara
- Sunarko, 2006, *Pengantar Manajemen Publik*, Gramedia Pustaka. Utama
- Tjokroamidojo, 2003, *Paradigma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia*, Gramedia Pustaka. Utama
- Wresniwiro, 2007, *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta
- <http://www.lampungtoday.com/go/today-news/5225-infrastruktur-jalan-di-mesuji-seperti-dianaktirikan.html>, diunduh tanggal 10 Desember 2015 Pukul 15.12 WIB.